

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPUASAN
MASYARAKAT DALAM PROGRAM RUMAH HUNIAN SEMENTARA BAGI
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG SEMERU
(Studi Kasus Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)**

Andhika Hidayat Soekotjo¹, Slamet Muchsin², Taufiq Rahman Ilyas³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

E-mail: andhikahs16@gmail.com

ABSTRAK

Pengungsian akibat letusan gunung Semeru di 151 titik pengungsian terkonsentrasi di 3 kecamatan yang tersebar di 118 titik di wilayah Kabupaten Lumajang dan 14 titik di luar Kabupaten Lumajang (BPBD, 2021). Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengaruh kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam pembelian hunian sementara bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru. Metode yang digunakan kuantitatif yang dipadukan dengan penelitian deskriptif. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode regresi sederhana. Hasil penelitian berdasarkan uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan sementara di Kabupaten Lumajang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat yang tinggal di perumahan sementara. Hasil pengujian statistik menunjukkan validitas pernyataan penelitian karena nilai (r) lebih besar dari nilai (r) tabel dan nilai probabilitas (sig) kurang dari 0,05. Uji reliabilitas menunjukkan koefisien Cronbach's Alpha (0,887) untuk variabel kebijakan pemerintah (X) dan (0,843) untuk kepuasan masyarakat (Y), melebihi nilai (0,6), menunjukkan reliabilitas baik dari instrumen kuesioner. Uji varians dengan nilai (0,126) lebih besar dari 0,05, menandakan tidak ada perubahan varians yang signifikan pada data residu. Uji normalitas (0,066) juga lebih besar dari 0,05, menunjukkan data residual berdistribusi cukup normal. Hasil uji (F) menunjukkan (0,00) kurang dari 0,05, validasi model regresi memprediksi variabel kepuasan masyarakat dengan pengaruh variabel kebijakan pemerintah (X). Analisis ini menghasilkan (R^2) (0,308), menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mempengaruhi (30,8%) kepuasan masyarakat, dengan (59,2%) volatilitas dipengaruhi faktor lain. Koefisien regresi (X) (0,441) menunjukkan pengaruh positif variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan masyarakat (Y). Signifikansi (t) (0,000) kurang dari 0,05, menandakan pengaruh signifikan variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan masyarakat (Y).

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Kepuasan Masyarakat, Rumah Hunian Sementara

Pendahuluan

Bencana merupakan kejadian tak terduga dan tak bisa dihindari yang mengakibatkan kerugian. Masyarakat segera mencari keselamatan dan mengungsi ke tempat aman, meninggalkan harta benda. Indonesia terletak di wilayah rawan bencana alam, dikenal sebagai cincin api Pasifik, yang menyebabkan seringnya bencana alam terjadi. Namun, ini juga membawa dampak positif, seperti tanah subur dan hasil pertanian melimpah. Data lapangan mencerminkan situasi saat erupsi Gunung Semeru, dengan banyak masyarakat mengungsi ke 151 titik pengungsian, sebagian besar di 3 kecamatan dan sejumlah lainnya di Kabupaten Lumajang serta di luar wilayah itu (BPBD, 2021).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang menyatakan sebanyak 1027 rumah huni, 1 fasilitas kesehatan, 1 jalur penghubung, 24 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas

ibadah mengalami kerusakan. Kerugian lain yang ditimbulkan, seperti 684 ekor kambing/domba, 764 ekor sapi potong, dan 1578 ekor unggas. Kementerian PUPR pada Mei 2022 menyatakan target rencana rumah hunian sementara akibat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 1951 unit rumah telah dibangun, di mana 878 unit di antaranya merupakan rumah hunian sementara yang dikonstruksi oleh 81 LSM. Rinciannya, 437 unit telah selesai dibangun, 441 unit masih dalam tahap penyelesaian, dan 130 unit sudah ditempati. Proses pembangunan untuk rumah hunian sementara akan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang serta BNPB.

Oleh karena itu, dalam upaya ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan kebijakan terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menginisiasi pembangunan rumah sementara

sebagai respons untuk memenuhi kebutuhan yang tak terelakkan ini. Warga yang terdampak oleh bencana alam akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-Undang ini menekankan pentingnya pengaturan tata ruang sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan bencana pada fase pra-bencana, baik dalam situasi tanpa bencana maupun dalam situasi potensi bencana. Sebagai tindak lanjut dari kerangka kebijakan penanggulangan bencana, diterapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 yang berfokus pada penanganan para pengungsi dalam kondisi darurat akibat bencana.

Pelaksanaan upaya mitigasi bencana melibatkan sejumlah determinasi yang meliputi pengukuran arah kebijakan pembangunan yang rentan terhadap bencana, aktivitas preventif bencana, respons dalam keadaan darurat, dan pemulihan. Kebijakan merujuk pada perencanaan tindakan atau resolusi yang diambil oleh berbagai entitas sebagai langkah untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi. Penetapan kebijakan memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi, sebagaimana diungkapkan oleh Iskandar (dikutip dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017). Putra (dalam Ismail & Sofwani, 2016) berpendapat bahwa perumusan kebijakan adalah tahap awal dalam seluruh proses kebijakan publik. Keberhasilan kebijakan yang dirancang untuk masa depan sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada fase ini. Tjokroamidjojo (dalam Ismail & Sofwani, 2016) menjelaskan bahwa jika pemilihan alternatif dilakukan satu kali dan selesai, itu disebut pengambilan keputusan. Namun, jika pemilihan alternatif berlangsung berulang tanpa selesainya, itu disebut perumusan kebijakan. Ini mengindikasikan bahwa perumusan kebijakan publik melibatkan serangkaian langkah, yaitu:

1. Menentukan agenda.
2. Merumuskan dan melegitimasi.
3. Melaksanakan program.
4. Mengevaluasi pelaksanaan, kinerja, dan dampak.
5. Mengambil keputusan tentang masa depan kebijakan dan program.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan hunian sementara untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru. Langkah ini merupakan bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama mengingat terjadinya bencana alam erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021. Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, yang memaksa warga terdampak untuk mengungsi. Efeknya menyebabkan

warga kehilangan tempat tinggal mereka. Kerusakan pada rumah-rumah masyarakat bervariasi dari ringan, sedang, hingga berat. Upaya penanganan dilakukan untuk memastikan warga dapat hidup dengan layak, bermartabat, dan aman.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menunjukkan seriusnya dalam mengatasi dampak bencana alam ini melalui berbagai kebijakan yang dijalankan. Harapannya, masyarakat di Kabupaten Lumajang akan mendapatkan relokasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi rumah yang layak huni. Maka, diperlukan studi mendalam mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap program rumah hunian sementara yang diterapkan untuk mereka yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat kepuasan warga di Kabupaten Lumajang terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Maka peneliti mengambil judul tentang **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Program Rumah Hunian Sementara bagi Masyarakat yang Terdampak Erupsi Gunung Semeru (Studi Kasus Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)”**.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam pengadaan rumah hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan, tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam pengadaan program rumah hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini akan menjadi kontribusi dan juga dokumen untuk mengembangkan penelitian bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan pendekatan pada topik penelitian serupa.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini berkontribusi untuk membantu penulis lebih memahami teori-teori yang telah dipelajari selama menempuh studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Andriansyah (seperti disebutkan dalam Taufiqurokhman, 2014) mengartikan kebijakan publik atau kebijakan publik sebagai aturan-aturan tetap yang harus ditaati. Analogi kebijakan publik dapat dibandingkan dengan hukum; karena siapapun

yang melanggar harus menanggung akibatnya tergantung besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Badan yang bertanggung jawab menerapkan konsekuensi ini juga menentukan jenis tindakan yang akan diambil.

Implementasi Kebijakan

Dalam Subianto (2020), Sabatier & Mazmanian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan program yang dilaksanakan setelah pengesahan resmi kebijakan negara. Ini mencakup peristiwa dan aktivitas yang terjadi, termasuk aspek administratif dan upaya mempengaruhi masyarakat serta kejadian tertentu. Sementara itu, Menurut Meter & Horn dalam Subianto (2020), implementasi mengacu pada tindakan yang diambil secara pribadi, pejabat atau kelompok di sektor publik atau swasta, dalam mencapai tujuan penetapan kebijakan keputusan.

Kepuasan Masyarakat

Priansa (dalam Putra & Azis, 2019) mengartikan kepuasan masyarakat sebagai respons yang muncul dari masyarakat terhadap sejauh mana harapan mereka terpenuhi oleh kinerja aktual yang mereka rasakan setelah menggunakan layanan publik. Sesuai dengan perintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Instansi Pemerintah, Kepuasan Masyarakat Merupakan Data dan Informasi Tingkat kepuasan masyarakat diperoleh melalui ukuran kuantitatif dan kualitatif dari pandangan masyarakat. ketika mereka menerima layanan dari penyedia layanan publik. Hal ini melibatkan pembuatan perbandingan antara harapan masyarakat dan kebutuhan mereka.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang terstruktur, terencana dan sistematis mulai dari inisiasi hingga desain penelitian. Pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2017:7), didasarkan pada filsafat positivisme dan untuk menyelidiki pola tertentu. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian dan kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel Bebas

Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah Kebijakan Pemerintah (X) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022. Indikator-indikator dari kebijakan pemerintah dalam penelitian ini mencakup :

- a. pelaksanaan
- b. data dan konfirmasi
- c. konstruksi
- d. Penerimaan
- e. transfer
- f. Donor Bantuan
- g. Larang
- h. konsekuensi

2. Variabel terikat

Variabel ini terpengaruh oleh variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel terikat yaitu Kepuasan Masyarakat (Y) Indikator kepuasan mengacu pada (Islami, N. W. (2022) yang meliputi:

- a. ketentuan
- b. Sistem, mekanis, prosedur
- c. Lama waktu
- d. Karakteristik produk
- e. Kemampuan pelaksana
- f. Perilaku eksekutor
- g. Penanganan keluhan, masukan
- h. infrastruktur

Penelitian ini menerapkan skala Likert dalam mengukur variabel-variabelnya. Sesuai dengan Sugiyono (2017), Skala Likert dipakai untuk menilai pandangan, sikap, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena yang telah dijelaskan secara jelas oleh peneliti. Dalam skala ini, tanggapan pada setiap pernyataan instrumen diukur menggunakan skor 1 hingga 5.

keterangan:

- a. sangat tidak setuju = 1
- b. tidak setuju = 2
- c. ragu-ragu = 3
- d. setuju = 4
- e. sangat setuju = 5

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kecamatan Candipuro, terdapat sejumlah 400 orang yang berada dalam hunian sementara.

2. Sampel

Sampel merupakan segmen dari seluruh populasi. Dalam situasi di mana populasi besar dan analisis menyeluruh tidak praktis karena keterbatasan anggaran, sumber daya, dan waktu, peneliti dapat memilih sampel yang mencerminkan karakteristik populasi. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin sebagaimana yang terlihat dalam contoh berikut ini :

$$n = \frac{N}{1+N^2}$$

keterangan:

- n = banyak sampel
N = Populasi
e = tingkatan ketidaktekelitian karena Berdasarkan rumus tersebut maka :

$$n = \frac{4}{1+4} = \frac{4}{(0,1)} = \frac{4}{1+4} = \frac{4}{5} = 80$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah sampel yang ditentukan adalah sebanyak 80 responden. Teknik ini disebut *simple random sampling*.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di rumah hunian sementara di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Periode penelitian berlangsung dari bulan Desember 2022 hingga Agustus 2023. Rentang waktu penelitian mencakup mulai dari pengajuan judul melalui proposal penelitian hingga penyelesaian presentasi akhir penelitian (sidang).

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi dokumentasi merupakan pendekatan untuk menghimpun dan menganalisis data atau dokumen yang relevan dengan penelitian..
- 2) Kuesioner diberikan kepada masyarakat yang menerima rumah hunian sementara untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kebijakan program rumah hunian sementara.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Sederhana

Pendekatan untuk mengidentifikasi dampak kepuasan masyarakat terhadap kinerja kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, analisis ini dijalankan melalui aplikasi SPSS 18 dengan rumus yang sesuai :

$$Y = a + bX$$

keterangan:

Y = Kepuasan masyarakat

a = konstanta intersep

b = konstanta regresi

X = Kebijakan pemerintah

Uji T

Digunakan untuk mengevaluasi signifikansi sebagian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui perbandingan antara nilai t yang dihitung dan tabel t. Rumus uji t (t hitung) adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b}{S_b}$$

keterangan:

b: koefisien regresi

sb: kesalahan dari standart koefisien regresi

Ho bilamana diterima $t \text{ hitung} < t \text{ table}$

Ho bilamana ditolak $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ table}$

Uji F

Digunakan untuk menguji pengaruh kolektif variabel bebas pada variabel terikat. Berikut rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis :

$$F \text{ Hitung} = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(N-K)}$$

keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

N = Banyaknya sampel (observasi)

K = Banyaknya parameter regresi + konstanta

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini menggambarkan sejauh mana variasi dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 berada dalam rentang 0 hingga 1, dan saat mendekati 0, menandakan variasi terikat yang kurang dijelaskan. Jika mendekati 1, variasi terikat banyak dijelaskan. Nilai $R^2 = 0$ menunjukkan variabel terikat tak dapat dijelaskan variabel bebas.

Uji Validitas

Digunakan untuk memastikan efektivitas instrumen pengukuran yang telah disusun. Ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel :

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dalam konteks ini:

- X = nilai skor dari masing-masing variabel dalam kuesioner.

- Y = total skor dari seluruh variabel dalam kuesioner.

- n = jumlah responden.

- rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y.

Uji Reliabilitas

Uji ini mengevaluasi sejauh mana alat pengumpul data memberikan hasil yang konsisten, akurat, dan stabil dalam menggambarkan gejala tertentu dari individu, bahkan jika data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumbermujur yang terletak di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Desa ini memiliki luas 1.690 hektar, yang terdiri dari lahan gersang 376,50 hektar, lahan basah 597,50 hektar, dan lahan lainnya 715 hektar. Letaknya di ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Desa Sumbermujur berfungsi sebagai desa penyangga utama (DPU) yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), sehingga tercipta interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan. Interaksi tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif sehingga mendorong perlunya kepedulian terhadap kelestarian kawasan ini melalui pengelolaan yang cerdas untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Desa Sumbermujur yang merupakan satu-satunya desa pendukung utama TNBTS di Kecamatan Candipuro terletak sekitar 8 km sebelah selatan ibu kota kabupaten dan sekitar

35 km dari ibu kota kabupaten Lumajang. Desa ini berbatasan dengan Desa Pasru Jambe di sebelah utara, Desa Sumbe Wuluh di sebelah selatan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN – BTS) di sebelah barat, dan Desa Penanggal di sebelah timur.

Gambaran Umum Responden dan Penyajian Data

1. Deskripsi responden ditinjau dari jenis kelamin

Tabel 1.

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Orang	Prosentase
Laki laki	36	45,0 %
Perempuan	44	55,0 %
jumlah	80	100%

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam Tabel 1, mengindikasikan bahwa rumah hunian sementara dihuni lebih banyak oleh masyarakat perempuan.

2. Deskripsi responden ditinjau dari Usia

Tabel 2

Usia Responden

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 30 tahun	20	25 %
30 – 40 tahun	25	31,25%
> 40 tahun	35	43,25%
Jumlah	80	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Melihat data yang tertera pada Tabel 2, bahwa mayoritas responden memiliki usia di atas 40 tahun.

3. Deskripsi responden ditinjau dari latar belakang

Tabel 3

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	42	52,5 %
SLTP	16	20,0%
SLTA	22	27,5 %
Jumlah	80	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Melalui data tersebut, terlihat bahwa mayoritas responden rumah hunian sementara memiliki pendidikan dasar, khususnya Pendidikan SD, yang berjumlah 42 orang (52,5% dari total responden). Sebanyak 22 orang (27,5% dari total responden) memiliki latar belakang

Pendidikan SLTA, sementara 16 orang (10% dari total responden) memiliki latar belakang SLTP.

Deskripsi Variabel Penelitian

Di bagian ini, penulis akan menguraikan tentang analisis deskriptif yaitu menjabarkan data yang diperoleh yaitu mengenai variable kebijakan pemerintah dan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan rumah hunian sementara.

1. Variabel Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan penyebaran kuesioner, dapat diamati tanggapan responden terhadap indikator-indikator dalam variabel kebijakan pemerintah yang menjadi fokus penelitian ini:

Tabel 4

Distribusi Frekuensi Variabel Kebijakan Pemerintah (X)

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Indikator	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X1	0	0,0	0	0,0	6	7,5	47	58,8	27	43,8	4,76
X2	0	0,0	1	1,3	1	1,3	60	75,0	18	22,5	4,19
X3	0	0,0	1	1,3	11	13,8	44	55,0	27	33,8	4,14
X4	0	0,0	1	1,3	17	21,3	49	61,3	13	16,3	3,93
X5	0	0,0	1	1,3	9	11,3	52	65,0	17	21,3	4,08
X6	0	0,0	0	0,0	14	17,5	53	66,3	13	16,3	3,99
X7	0	0,0	1	1,3	16	20,0	54	67,5	9	11,3	3,89
X8	0	0,0	0	0,0	18	22,5	49	61,3	13	16,3	3,94
Grand mean											4,05

keterangan:

X1 : pelaksanaan

X2 : pendataan dan konfirmasi

X3 : konstruksi

X4 : Penerima

X5 : transfer

X6 : peran Pemberi Bantuan

X7 : Larangan

X8 : konsekuensi

2. Variabel Kepuasan Masyarakat

Tabel 5

Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Masyarakat (Y)

Indikator	STP		TP		RR		P		SP		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y1	0	0,0	0	0,0	4	5,0	60	75,0	16	20,0	4,5
Y2	0	0,0	0	0,0	6	7,5	63	78,8	11	13,8	4,06
Y3	0	0,0	0	0,0	7	8,8	56	70,0	7	8,8	3,88
Y4	0	0,0	0	0,0	5	6,3	60	75,0	15	18,8	4,13
Y5	0	0,0	1	1,3	4	5,0	57	71,3	8	10,0	3,90
Y6	0	0,0	0	0,0	12	15,0	63	78,8	5	6,3	3,91
Y7	0	0,0	0	0,0	16	20,0	60	75,0	4	5,0	3,85
Y8	0	0,0	1	1,3	3	3,8	59	73,8	7	8,8	3,90
Grand mean											3,97

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Keterangan:

Y1 : ketentuan

Y2 : Sistem, mekanisme, dan prosedur

Y3 : Waktu

Y4 : karakteristik produk

Y5 : kemampuan pelaksana

Y6 : Penanganan keluhan dan masukan

Y7 : Perilaku pelaksana

Y8 : Sarana dan prasarana

Analisis Data dan Interpretasi

1. Hasil pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r yang dihitung dan nilai r pada tabel, dengan kriteria berikut :

- Apabila nilai r hitung $\geq r$ pada tabel (pada tingkat signifikansi α 5%), maka dapat diinterpretasikan bahwa item kuesioner tersebut memiliki validitas.
- Jika nilai r hitung $< r$ pada tabel (pada tingkat signifikansi α 5%), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item kuesioner tersebut tidak memiliki validitas.

Tabel 6
Hasil Uji Instrumen Validitas

Pernyataan	r hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X1	0.553	0.000	0.351	Valid
X2	0.429	0.000	0.351	Valid
X3	0.300	0.000	0.351	Valid
X4	0.748	0.000	0.351	Valid
X5	0.539	0.000	0.351	Valid
X6	0.509	0.000	0.351	Valid
X7	0.776	0.000	0.351	Valid
X8	0.355	0.000	0.351	Valid
Y1	0.730	0.000	0.351	Valid
Y2	0.718	0.000	0.351	Valid
Y3	0.502	0.000	0.351	Valid
Y4	0.551	0.000	0.351	Valid
Y5	0.831	0.000	0.351	Valid
Y6	0.751	0.000	0.351	Valid
Y7	0.521	0.000	0.351	Valid
Y8	0.711	0.000	0.351	Valid

Sumber : Data Diolah (2023)

Dari Tabel 6 disimpulkan nilai r hitung untuk setiap pernyataan pada variabel kebijakan pemerintah (X) dan kepuasan masyarakat (Y) melebihi ambang batas nilai r pada tabel dan nilai probabilitas (sig) $> 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pencarian pada variabel ini dianggap valid.

3. Hasil pengujian Realibilitas

Reliabilitas merujuk pada kestabilan suatu instrumen pengukuran untuk memberikan hasil yang serupa dan konsisten dalam pengukuran berulang, selama kondisi pengukuran tidak mengalami perubahan. Menurut pandangan Riduwan yang dikutip dalam penelitian oleh Sitinjak (2023), reliabilitas didefinisikan sebagai kemampuan alat ukur, seperti kuesioner, dalam mengukur variabel yang diindikasikan oleh pertanyaan-pertanyaan dalam alat ukur tersebut. Pertanyaan dalam alat ukur dianggap reliabel jika mereka mampu menghasilkan jawaban yang konsisten dan sejalan dari responden yang sama.

Reliabilitas dapat dinilai melalui metode pengukuran tunggal, yang melibatkan perbandingan hasil dari satu pertanyaan dengan pertanyaan lain atau dengan

menganalisis korelasi antara tanggapan pada beberapa pertanyaan. Pendekatan lainnya adalah melalui perhitungan menggunakan perangkat statistik seperti uji Cronbach's alpha (α) pada perangkat lunak statistik seperti SPSS. Sitinjak berpendapat bahwa suatu konstruk atau variabel dianggap memiliki reliabilitas apabila nilai Cronbach's alpha memiliki angka lebih dari 0,60. Pada penelitian ini, reliabilitas diuji menggunakan metode Alpha Cronbach. Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel yang tengah diselidiki dijelaskan dalam tabel yang diperlihatkan di bawah ini:

Tabel 7
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan
Kebijakan Pemerintah (X)	0.867	Reliabel
Kepuasan Masyarakat (Y)	0.847	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, setiap variabel memiliki koefisien Alpha Cronbach yang melampaui ambang 0,6. Temuan ini mengungkapkan bahwa instrumen kuesioner yang diterapkan dalam penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang memadai dan dapat diandalkan.

Dalam analisis regresi, terdapat beberapa asumsi yang perlu dipenuhi, antara lain ketiadaan heterokedastisitas, ketiadaan multikolinieritas, serta distribusi data yang mendekati normalitas. Rincian mengenai perhitungan dan pengujian asumsi-asumsi tersebut dalam model regresi dapat diuraikan sebagai berikut:

Uji Heterokedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah model regresi menunjukkan variasi variansi yang tidak seragam di antara residu di berbagai pengamatan. Model regresi yang diharapkan adalah homoskedastis atau memiliki ketidakseragaman variansi yang minimal di antara residu pengamatan. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi distribusi residual dalam konteks penelitian. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah data residual dalam penelitian sudah mendekati distribusi normal.

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1. (Constant)	-3.426	1.548			-2.222	.031
Kebijakan Pemerintah	.138	.047			3.541	.001

a. Dependent Variable: Desaru

Dari Tabel 8, hasil pengujian heteroskedastisitas di atas mengindikasikan bahwa nilai signifikansi (sig) untuk setiap variabel independen > daripada nilai α (0,05). Maka, dapat dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam data residual.

Uji Normalitas

K keberlanjutan asumsi normalitas dalam model regresi dapat dikonfirmasi apabila sisa kesalahan yang timbul dari model regresi mengikuti distribusi yang berbentuk normal. Pengujian normalitas dapat dijalankan melalui alat analisis statistik, seperti metode Kolmogorov-Smirnov, atau melalui representasi visual dalam bentuk grafik (Scatter Plot). Data dianggap memenuhi uji normalitas jika nilai signifikansi melebihi 0,5 berdasarkan pengujian statistik (Cristiyanti dkk., 2023).

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38266820
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.070
	Negative	.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed) ^a		.066
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil yang terlihat di Tabel 9 dari uji normalitas mengungkapkan bahwa nilai signifikansi (sig) 0,066, yang mengatasi ambang α (0,05). Maka, kesimpulannya adalah bahwa (H_0) diterima, dan data residual memiliki distribusi yang sesuai dengan distribusi normal.

Uji F

Uji F atau analisis variansi (ANOVA) memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dampak bersama-sama dari seluruh variabel bebas pada variabel terikat. Selain itu, uji ini juga menilai apakah model regresi secara keseluruhan memiliki signifikansi. Hasil dari uji F memberikan informasi apakah model regresi digunakan untuk tujuan prediksi atau estimasi masa depan.

Tabel 10 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Interpreting	186.458	1	186.458	38.589	.000 ^a
	Residual	440.492	78	5.647		
	Total	626.950	79			

a. R Squared = .300 (Adjusted R Squared = .288)

Berdasarkan hasil tersebut, bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Menandakan bahwa model regresi memiliki dampak yang signifikan pada variabel kepuasan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pemerintah (X) mempengaruhi Kepuasan Masyarakat (Y). Hasil analisis juga menunjukkan R Square sebesar 0,308, yang mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah mempengaruhi 30,8% kepuasan masyarakat, sedangkan sisanya sekitar 59,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Cara untuk menyelidiki tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Salah satu bentuk dasar dari model regresi adalah regresi linear dengan satu variabel bebas. Penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana efek dari variabel bebas, yakni kebijakan pemerintah dan kepuasan masyarakat.

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

		Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Beta		
1	(Constant)	17.484		1.052	.300
	Kebijakan Pemerintah	.441	.375	3.850	.000

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Persamaan hasil yang dihasilkan adalah:

$$Y = 17,484 + 0,441 X$$

Dari persamaan tersebut, maka :

- Konstanta 17,484 menunjukkan bahwa ketika variabel bebas diasumsikan nol, variabel Kepuasan Masyarakat (Y) memiliki nilai 17,484.
- Koefisien regresi X sebesar 0,441 menandakan pengaruh positif antara variabel Kebijakan Pemerintah (X) dan variabel Kepuasan Masyarakat (Y). Ini mengindikasikan bahwa semakin baik Kebijakan Pemerintah (X), semakin meningkatkan Kepuasan Masyarakat.

Selain itu, dapat diperhatikan dari Tabel 11 bahwa nilai signifikansi t adalah 0,000, yang lebih rendah daripada tingkat signifikansi 0,05. Informasi ini menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pemerintah (X) memiliki dampak yang signifikan pada variabel Kepuasan Masyarakat (Y).

Pembahasan

Kebijakan pemerintah mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memegang peranan penting sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa terdapat berbagai faktor lain yang juga berkontribusi terhadap tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman ini memiliki implikasi penting bagi

pemerintah dalam merancang langkah-langkah dan kebijakan yang efektif dalam menghadapi situasi bencana, khususnya upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Melalui uji validitas pada penelitian ini, ditemukan bahwa seluruh pernyataan yang berkaitan dengan variabel Kebijakan Pemerintah (X) dan Kepuasan Masyarakat (Y) memiliki nilai rhitung yang melebihi nilai rtabel, serta nilai sig yang lebih rendah dari 0,05. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa semua pernyataan dianggap valid. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel mempunyai nilai koefisien Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa alat kuesioner yang digunakan dalam penelitian mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diandalkan.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000, lebih rendah dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa model regresi dapat memprediksi variabel kepuasan masyarakat dengan pengaruh yang kuat dari variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap tingkat kepuasan masyarakat (Y). Analisis ini juga menghasilkan R-squared sebesar 0,308, menunjukkan kontribusi kebijakan pemerintah sekitar 30,8% dalam menjelaskan variasi kepuasan masyarakat, sementara 59,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor belum terungkap.

Hasil pengujian variasi/heteroskedastisitas menunjukkan bahwa signifikansi (sig) untuk setiap variabel independen melebihi nilai α (0,05), menandakan tidak ada variasi yang signifikan dalam data residu. Pengujian normalitas menunjukkan bahwa signifikansi (sig) 0,066 melebihi nilai α (0,05), menunjukkan data residual mendekati distribusi normal. Analisis regresi menyimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan masyarakat (Y), dengan koefisien regresi X sebesar 0,441. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik Kebijakan Pemerintah (X), semakin tinggi Kepuasan Masyarakat (Y). Dengan demikian, penelitian ini membuktikan dampak positif dan signifikan dari variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap kepuasan masyarakat (Y) dalam konteks "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Program Rumah Hunian Sementara bagi Masyarakat yang Terdampak Erupsi Gunung Semeru", berdasarkan analisis data menggunakan metode regresi linier sederhana.

Berdasarkan hasil analisis diketahui jika responden yang merupakan masyarakat penghuni rumah hunian sementara memberikan penilaian kepuasan yang paling rendah terhadap perilaku petugas dalam memberikan rumah hunian sementara. Hal ini bisa dikarenakan yang menjadi prioritas petugas adalah rumah hunian sementara dapat segera diselesaikan dan dihuni sehingga

terkadang tidak memperhatikan masalah perilaku yang bagi masyarakat di wilayah pedesaan masih diperhatikan. Sedangkan kepuasan tertinggi pada persyaratan, yang menunjukkan jika masyarakat penghuni rumah hunian sementara (RHS) merasa persyaratan yang ditetapkan pemerintah tidak menyulitkan dan bahkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru untuk menghuni rumah tersebut.

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Ada dampak positif dan bermakna secara individu antara kebijakan pemerintah terhadap kepuasan masyarakat yang tinggal di rumah hunian sementara. Ini berarti bahwa semakin baik kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah terhadap rumah hunian sementara, maka semakin puas masyarakat yang terdampak oleh erupsi Gunung Semeru. Hasil tersebut didukung dengan Koefisien regresi X memiliki nilai 0,441, mengindikasikan dampak positif variabel kebijakan pemerintah (X) pada variabel kepuasan masyarakat (Y).
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait rumah hunian sementara telah terbukti semakin meningkat. Temuan ini didukung oleh nilai koefisien regresi X sebesar 0,441 menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel kebijakan pemerintah (X) terhadap variabel kepuasan masyarakat (Y).

Saran

Terkait dengan hal hal yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, dalam kaitannya dengan kepuasan masyarakat yang ada di rumah hunian sementara fasilitas yang ada sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri. Sebaiknya fasilitas perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di rumah hunian sementara.
2. Untuk lokasi yang ditentukan dalam membangun rumah hunian sementara, adanya lowongan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan karena pekerjaan masyarakat yang dulu jauh atau sudah hilang.
3. Sosialisasi lebih lanjut diperlukan agar masyarakat yang sudah lanjut usia lebih bisa mengerti tentang pendataan dan penyelenggaraan rumah hunian sementara.

Daftar Pustaka

Buku:

- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad
- Anggara. 2018. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Subianto. 2020. Kebijakan Publik. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta

Jurnal dan Skripsi:

- Haedar Akib. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Makasar.
- Sitinjak. (2023). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi,Partisipasi Manajemen, Pengetahuan Manajer Akuntansi Terhadap Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Kelian Mitra Karya
- Mohamad Kharis Umardani. (2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai. Universitas Yarsi.
- Pramono & Kinansi. (2020). Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta (Studi Pemberdayaan dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat). Unirversitas Slamet Riyadi.
- Ritonga. (2020). Jurnal Kewahyuan Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Taqiy & Kurniawan. (2023). Kolaboraasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan Gerakan Pramuka Dalam Penyelenggaraan Hunian Sementara Bagi Penyintas Erupsi Gunung Semeru. Universitas Negeri Surabaya.
- Antoro. (2016). Sistem Bantu Administrasi Pendataan Penduduk Desa Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Asariansyah, Saleh, Rengu. (2013). Paartisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya.
- Assaad. (2017). Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati). UMI Makasar.
- Hesti. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial BPNT Selama masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Fajrin, J., Muchlis, M., & Tandean, Y. R. (2020). Pengembangan Desain Hunian Sementara Untuk Korban Gempa Lombok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 103–109.
<http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jpm/article/view/1077/761>
- Hayat, H., Malang, U. I., & Pendapatan, P. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Universitas Islam Malang Malang, Indonesia*.
<https://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/BukuKebijakanPublik.pdf>
- Islami, N. W. (2022). ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN PUJON, NGANTANG DAN KASEMBON. *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi*, 4(1), 47–57.
<http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/62>
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
<http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf
- Perencanaan, T., Dan Evaluasi, I., Subianto, A., & Si, M. (n.d.). *KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Putra, D. S., & Azis, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan E-filing Terhadap Kepuasan Masyarakat Kota Bandung. *EProceedings of Management*, 6(2).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>
- Taufiqurokhman, D., & PeneRBIT, Ms. (n.d.). *Riwayat Penulis*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*. <https://bnpb.go.id/> Diakses 12 November 2022
- Muhammad Andriansyah, ST. 2021. *Efektivitas Konsep Model Dan Implementasi Hunian Sementara Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi Sulawesi Tengah 2018*

Studi Kasus Model Huntara Di Kabupaten Sigi

- Dyah Puspa Ayu, Budi Prayitno, Agus Haryadi. 2020. *Fabrikasi Hunian Sementara Untuk Pasca Bencana*. Jurusan Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
- Anggiat Purba, Siswo Hadi Sumantri, Anwar Kurnadi, Dimas Raka Kurniawan Putra. 2022. *Analisis Kapasitas Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru*. Universitas Pertahanan Republik Indonesia
- Mustainah M1 dan Moh. Royfand. 2022. *Problematisasi Dan Kesiapsiagaan Pemerintah Dalam Penanganan Bencana*. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako.

Landasan Hukum:

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebijakan Penanganan Pengungsi Pasca Bencana. <https://bnpb.go.id/> Diakses 13 November 2022.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Indonesia. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023.
- Indonesia. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru.